

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam Bab V ini, penulis akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari penulisan Skripsi dengan judul “Sejarah Pemilu Demokratis di Indonesia Tahun 1999-2014”. Dalam hal penentuan kesimpulan dalam Skripsi ini, penulis mendasarkannya kepada rumusan masalah penelitian yang terdapat dalam Bab I yang dijelaskan dan dijabarkan lebih detail dalam Bab IV.

5.1 Simpulan

Dalam hal pembuatan kesimpulan ini, terlebih dahulu penulis kembali memaparkan mengenai Tema dari Skripsi yang disusun oleh Penulis yaitu mengenai Pemilu era Reformasi dari Pemilu 1999 hingga Pemilu 2014. Sedangkan mengenai rumusan masalah yang diangkat terdapat 3 rumusan masalah antara lain pertama mengenai perencanaan dan pelaksanaan pemilu era Reformasi, kedua, mengenai persamaan dan perbedaan karakteristik pemilu era Reformasi serta ketiga, mengenai latar belakang diadakannya Pemilu Presiden secara langsung yang dimulai pada Pemilu 2004. Mengenai kesimpulan dari Skripsi yang disusun Penulis dapat dipaparkan sebagai berikut,

Era Reformasi menjadi era yang mengembalikan Indonesia menuju sistem pemerintah demokrasi yang salah satu indikatornya yaitu Pemilu yang Demokratis selama 4 kali. Era Reformasi dilatarbelakangi oleh tumbangnya Rezim Orde Baru. Rezim Orde Baru yang sebelumnya digjaya dengan bertahan selama 30 tahun pada akhirnya dapat ditumbangkan oleh gerakan mahasiswa yang dimulai pada medio tahun 1997 dengan terjadinya krisis ekonomi yang menyebabkan legalitas utama pemerintah Orde Baru yang menjanjikan pembangunan ekonomi tidak dapat dipertahankan kembali. Di samping itu, demokrasi pada masa tersebut yang telah dikekang serta ditambah kebobrokan pemerintah Orde Baru yang melakukan KKN. Proses peralihan pemerintah dari Orde Baru ke era Reformasi dimulai ketika presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden selama 30 tahun, kemudian jabatan Presiden diserahkan kepada B.J Habibie yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden. B.J Habibie yang dianggap sebagai bagian dari Pemerintah Orde Baru mengalami krisis legitimasi politik ditambah

beban krisis ekonomi dari pemerintah Orde Baru. Sehingga karena hal tersebut B.J Habibie melakukan perubahan yang cukup radikal yaitu mengembalikan pemerintahan Indonesia menuju kehidupan yang demokratis antara lain dengan memberikan kebebasan pers, kebebasan pendirian partai politik dan menyelenggarakan Pemilu 1999 untuk membentuk pemerintah yang baru yang lebih *legitimate*. Pemilu 1999 walaupun harus melakukan persiapan yang paling singkat sepanjang sejarah Pemilu Indonesia serta terdapat kekurangan yang lainnya, Pemilu 1999 tetap dapat diselenggarakan dengan menerapkan nilai demokratis yang dianggap berada di urutan kedua setelah Pemilu 1955. Setelah Pemilu 1999, Pemilu di Indonesia diselenggarakan dengan periode 5 tahun sekali antara lain Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014 serta Pemilu 2019 yang akan diselenggarakan dalam waktu satu atau dua tahun lagi pada tanggal 17 April 2019.

Pada Pemilu 2004, terdapat kemajuan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu dibandingkan dengan Pemilu 1999 antara lain KPU yang bersifat independen dan profesional, pemilihan anggota DPR tanpa pengangkatan tetapi seluruhnya dipilih secara langsung, dan pertama kalinya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Pemilu 2004 berlangsung dengan lebih damai, lancar, dan menerapkan nilai demokrasi yang cukup baik walaupun Pemilu 2004 nampak lebih menurun dari segi kualitas dari Pemilu 1999 khususnya dari tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu. Setelah Pemilu 2004, Pemilu 2009 yang terdapat harapan lebih baik dari Pemilu 2004 tetapi justru dalam pelaksanaannya lebih buruk walaupun dalam peraturannya nampak melakukan perbaikan dari Pemilu 2004 antara lain sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak, terdapat sekjen KPU yang membantu tugas dari KPU, dan menggunakan cara memilih dengan mencontreng. Hal yang paling menonjol dari menurunnya kualitas demokrasi pada Pemilu 2009 yaitu masalah DPT dengan puluhan juta pemilih kehilangan hak pilihnya, sosialisasi dari KPU yang kurang gencar terhadap pemilih, netralitas beberapa anggota KPU yang berpihak kepada partai penguasa dan terjadinya penurunan drastis partisipasi pemilih dalam Pemilu 2009. Serta Pemilu terakhir yang diselenggarakan pada Pemilu 2014, KPU berusaha memperbaiki kelemahan KPU Pemilu 2009 antara lain dengan melakukan transparansi pada penyelenggaraan Pemilu walaupun masih tetap ditemui

kekurangannya walaupun tidak sebesar Pemilu 2009. Pada Pemilu 2014 menjadi pemilu yang paling brutal serta maraknya politik uang pada Pemilu Legislatif serta pada Pemilu Presiden terjadinya kampanye hitam dan terjadinya perpecahan antara pendukung kedua pasangan Calon.

Dalam Pemilu era Reformasi pula terdapat beberapa persamaan antara lain Pertama, terjadinya fenomena partai yang memenangkan Pemilu era Reformasi tidak dapat memenangkan kembali pada Pemilu selanjutnya padahal dalam posisi sebagai *incumbent*. Kedua, terjadinya penurunan persentase raihan suara dari partai pemenang Pemilu di era Reformasi. Ketiga, terjadinya kecenderungan terjadinya tren penurunan partisipasi pemilih dalam Pemilu era Reformasi dari Pemilu 1999 hingga tahun 2009 serta terjadi sedikit kenaikan partisipasi pemilih dalam Pileg 2014. Ketiga fenomena diatas saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Hal tersebut penyebab utamanya akibat kinerja partai pemenang Pemilu yang tidak memuaskan publik khususnya bagi pemilih partai tersebut. Keempat, penggunaan asas Pemilu yaitu Luberjurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil) yang merupakan revisi dari asas Pemilu 1955 dan Pemilu zaman Orde Baru yang menggunakan asas Luber (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia). Hal ini dilakukan oleh latar belakang sejarah penyelenggaraan Pemilu Zaman Orde Baru yang tidak demokratis. Kelima, terdapat perselisihan hasil Pemilu (PHPU) oleh MK yang dimulai pada Pemilu 2004. Hal ini berkaitan dengan terjadinya amandemen UUD 1945 yang mengatur mengenai kewenangan MK dalam melakukan PHPU serta hal ini berarti menunjukkan upaya dalam memperbaiki kualitas Pemilu khususnya dalam mengadili kecurangan dalam Pemilu. Keenam, terjadinya kekalahan partai islam terhadap partai Nasionalis seperti pada Pemilu 1955 dan Pemilu zaman Orde Baru. Hal ini menunjukkan partai Islam masih kurang diterima oleh mayoritas masyarakat Indonesia dibandingkan dengan partai Nasionalis.

Sedangkan dalam hal perbedaan karakteristik antara Pemilu di era Reformasi antara lain, pertama adalah persyaratan pendirian partai politik yang semakin ketat pada dari Pemilu 1999 hingga Pemilu tahun 2014. Tetapi persyaratan dalam pendirian partai politik ini menggunakan UU Pemilu yang sesuai dengan asas demokrasi dan terjadinya seleksi yang alami tanpa terdapat

unsur paksaan seperti pada masa Demokrasi Terpimpin dan Pemilu zaman Orde Baru. Kedua, penggunaan *Electoral Threshold* (ambang batas dalam mengikuti pemilu selanjutnya) dan *Parliamentary Threshold* (ambang batas mendapatkan kursi di parlemen) dalam Pemilu era Reformasi. Hal ini berhubungan dengan yang faktor yang pertama yaitu keduanya berguna dalam penyederhanaan partai politik. Ketiga, perbedaan struktur dan kinerja dari penyelenggara Pemilu di Era Reformasi. Pada Pemilu 1999 KPU terdiri dari pemerintah dan parpol peserta Pemilu 1999. Dalam hal kinerja sudah dapat menyelenggarakan Pemilu yang demokratis tetapi terjadi konflik akibat terdapat unsur politik yang diusung oleh anggota KPU yang berasal dari Parpol. Pada Pemilu 2004 hingga Pemilu 2014, KPU diperbaiki menjadi bersifat nasional, tetap, independen dan mandiri. Dalam hal kinerja pada Pemilu 2004 sudah dapat menyelenggarakan Pemilu yang demokratis tetapi terdapat skandal kasus korupsi pengadaan logistik Pemilu oleh beberapa anggota KPU. Tetapi pada Pemilu 2009 kinerja KPU justru memburuk yaitu ditandai oleh tidak profesionalnya KPU dalam menyelenggarakan Pemilu antara lain terdapat masalah DPT dan netralitas KPU dalam Pemilu 2009. Pada Pemilu 2014, KPU berusaha memperbaiki citra KPU sebelumnya yang buruk yaitu dengan meningkatkan transparansi dalam Pemilu. Keempat, perbedaan penggunaan sistem Pemilihan Umum yang digunakan dari pemilu 1999 hingga pemilu tahun 2014.

Dalam hal perbedaan karakteristik yang terdapat dalam Pemilu era Reformasi yaitu dalam penggunaan sistem Pemilunya yaitu pada Pemilu 1999 masih menggunakan sistem proporsional tertutup tetapi mirip seperti Pemilu 1971 (masih mengadopsi Pemilu zaman Orde Baru). Tetapi, pada Pemilu 2004 sistem Pemilu diubah menjadi sistem proporsional (daftar) setengah terbuka. Pada pemilu tahun 2009 pada awalnya sistem pemilu 2004 masih diadopsi dalam UU Pemilu 2009 tetapi pada akhirnya diubah menjadi sistem proporsional terbuka (suara terbanyak) berdasarkan keputusan MK, kemudian sistem ini pada Pemilu 2014 digunakan kembali dalam Pemilu Legislatif.

Dalam Pemilu era Reformasi terdapat salah satu hal yang cukup penting dalam melaksanakan nilai demokrasi dalam Pemilu yaitu Pemilu langsung Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini lahirnya gagasan Pemilu Presiden

secara langsung setidaknya terdapat 2 faktor yaitu faktor historis yaitu terjadinya pemerintah yang otoriter pada masa pemerintah Soekarno dengan Demokrasi Terpimpinnya dan pemerintah Soeharto dengan Demokrasi Pancasilanya. Keduanya pada akhirnya tumbang yaitu Soekarno ditumbangkan oleh MPRS pada tahun 1967 dengan mencabut mandatnya sebagai presiden seumur hidup pada tahun 1963. Pencabutan mandat ini diawali oleh peristiwa G/30 S (PKI) pada tanggal 30 September 1965 kemudian merembet kepada terjadinya penurunan kekuasaan presiden Soekarno antara lain terjadinya demonstrasi mahasiswa 1966 yang menuntut Tritura serta pelimpahan Supersemar oleh Soekarno kepada Soeharto dalam memulihkan keamanan pasca G/30 S PKI. Setelah Soekarno, Presiden Soeharto ditumbangkan oleh Gerakan Mahasiswa pada bulan Mei 1998 yang dilatarbelakangi oleh terjadinya krisis ekonomi pada medio 1997. Lahirnya pemerintah yang otoriter tersebut disebabkan oleh UUD 1945 yang mendukung terjadinya pemerintah yang otoriter antara lain tidak ada prinsip *check and balance*, UUD 1945 yang bersifat multitafsir, terlalu percaya kepada pemerintah, dan bersifat *Executive Heavy*.

Selain lahirnya pemerintah yang otoriter, terdapat alasan historis lainnya diadakan Pemilu Presiden secara langsung yaitu pada masa Transisi/awal era Reformasi (Habibie dan Gus Dur) yaitu terjadinya *Legislative Heavy* yang menyebabkan terjadinya kekuasaan Presiden yang mudah diintervensi oleh parlemen bahkan hingga di *impeachment* oleh DPR/MPR. Hal ini terjadi pada Presiden Habibie yang dijegal oleh DPR/MPR dalam pencalonan Pilpres dalam SU MPR 1999 yaitu dengan ditolaknya pidato pertanggungjawabannya akibat masalah referendum Timor Timur. Setelah Habibie, Presiden Gus Dur menjadi korban selanjutnya dari sistem ini, bahkan di *impeachment* oleh DPR/MPR pada tahun 2001 setelah melalui konflik antara Presiden dan DPR/MPR hingga melahirkan 2 buah Memorandum pada awal hingga pertengahan tahun 2001 akibat skandal *Buloggate* dan *Bruneigate*.

Dari kedua masa tersebut, pemilihan presiden secara tidak langsung tersebut melahirkan pemerintah yang pada akhirnya di *impeachment* baik oleh DPR/MPR maupun oleh gerakan mahasiswa (kekuatan sipil). Sehingga untuk memecahkan persoalan tersebut pemilihan presiden secara tidak langsung melalui

DPR/MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara digantikan oleh pemilihan presiden secara langsung dengan legitimasi yang kuat dari rakyat Indonesia. Proses perubahan tersebut dilakukan melalui faktor kedua yaitu secara yuridis dengan mengamandemen UUD 1945 yang sudah menjadi salah satu amanat dari Reformasi 1998. Amandemen tersebut dilakukan secara bertahap dari amandemen I hingga yang terpenting amandemen ketiga dan keempat yang melegalisasi pemilihan Presiden secara langsung yang dimulai pada Pemilu Presiden tahun 2004. Pemilihan Presiden secara Langsung tersebut menjadikan sistem pemerintah Indonesia berdasarkan sistem presidensial.

5.2 Rekomendasi

Dalam hal rekomendasi dalam Skripsi ini, penulis akan menjelaskannya secara singkat dalam beberapa poin berikut ini,

1. Bagi dunia pendidikan di tingkat SMA kelas XII dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia, Skripsi penulis ini cukup berguna dalam mengkaji Sejarah Indonesia pada Era Reformasi yang terdapat dalam KD 3.6 yaitu menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal Reformasi. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai Latar Belakang Lahirnya Era Reformasi dan Pemilu tahun 1999 yang dapat membantu siswa dalam menganalisis mengenai perkembangan dalam bidang politik dan sedikit dibahas mengenai situasi ekonomi pada awal Era Reformasi.
2. Dalam hal pengkajian Pemilu Era Reformasi ini penulis merasa bahwa dalam Pemilu Era Reformasi masih terdapat kajian yang kurang diteliti oleh peneliti yang lainnya antara lain mengenai Pemilu anggota DPD, Pilkada Langsung Tidak Serentak yang dimulai sejak 2005-2014 khususnya di daerah Jawa Barat seperti Pilgub Jabar 2007 dan 2013 dan yang paling baru adalah Pilkada Serentak 2015, dan 2017. Sehingga bagi peneliti lain yang akan meneliti mengenai Pemilu era Reformasi, dipertimbangkan untuk mengkaji topik kajian yang telah penulis sebutkan diatas.
3. Bagi pemerintah dalam hal penyelenggaraan Pemilu khususnya dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak 2019 satu tahun lagi dan Pemilu selanjutnya, harus dapat memperbaiki kekurangan dalam penyelenggaraan

dari Pemilu sebelumnya. Pada intinya, kekurangan tersebut dapat diamati dari masih terjadinya pelanggaran dalam Pemilu seperti politik uang, mencuri *start* dalam jadwal kampanye, profesionalitas KPU yang masih belum sepenuhnya netral dan bebas dari kepentingan politik, terjadinya perubahan UU Pemilu dalam setiap Pemilu era Reformasi 1999-2014, dll.